MEMANFAATKAN LAHAN PEKARANGAN

Kawasan Rumah Pangan Lestari

KR-Istimewa

Mahasiswa KKN Reguler UAD bersama warga setempat memanfaatkan pekarangan rumah.

BANTUL (KR) - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 119 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memanfaatkan lahan pekarangan menjadi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Pedukuhan Gedongsari, Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. "Kegiatan ini berkolaborasi bersama ibu-ibu PPK Gedongsari dengan menanam sayur-sayuran dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur," kata Ratna Prihatiningsih, Ketua Unit XI A1 KKN Reguler 119 UAD, Selasa (20/2).

Dijelaskan Ratna P, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun di suatu wilayah (dusun, desa, atau kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pangan keluarga melalui penyediaan tanaman obat dan aneka sayur.

Pembuatan KRPL dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mengurangi biaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, KRPL juga bertujuan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. **(Jay)-f**

PENANGANAN SAMPAH APK PEMILU

Jadi Fokus Perhatian DLHK DIY

YOGYA (KR) - Penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu 2024 menjadi fokus perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY bersama sejumlah penyelenggara Pemilu.

Untuk menangani sampah APK tersebut setelah pelaksanaan Pemilu selesai, akan dilakukan koordinasi lanjutan bersama para penyelenggara dan stakeholder terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menanggani sampah APK. Dalam penanganan tersebut akan diklasifikasikan mana yang perlu didaur ulang, dipakai ulang atau dimusnahkan.

"Saat ini sampah APK tersebut kebanyakan masih ada di gudang Bawaslu dan Satpol PP di masing-masing kabupaten/kota. Kami perkirakan jumlah sampah APK tidak akan bertambah lagi dari prediksi kami yang sekitar 160 ton itu. Karena kan sudah kita estimasikan seluruhnya. Jadi jumlah itu merupakan hasil kalkulasi dan perkiraan DLHK DIY bersama sejumlah penyelenggara Pemilu," kata Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo di Yogyakarta, Senin (19/2).

Kusno mengatakan, sampah APK yang tersimpan dalam gudang Bawaslu dan Sat Pol PP kabupaten kota itu merupakan hasil penertiban selama masa tenang. APK yang tidak ditertibkan secara mandiri oleh peserta Pemilu akan dibersihkan oleh petugas Sat Pol PP berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu setempat dan kemudian dibawa ke gudang masing-masing. Setelah dilakukan koordinasi rencananya sampah APK akan diolah melalui skema Refuse Derived Fuel (RDF) seperti yang dilakukan di Tamanmartani, Sleman.

"Khusus untuk pemusnahan sampah APK yang menggunakan metode RDF kami masih akan berkoordinasi dengan DLH Sleman. Pasalnya kapasitas pengolahan sampah masih terbatas, jadi dalam satu hari hanya mampu menampung sebanyak 15 ton. Jadi tidak mungkin semuanya dibuang ke Sleman, karena adanya keterbatasan tersebut," terang Kusno.

Menurut Kusno, seandainya ada warga yang ingin memanfaatkan ulang sampah APK hasil dari Pemilu 2024 pihaknya mempersilakan. Untuk itu mereka bisa mengirim surat ke kabupaten/kota berkaitan dengan administrasi, meskipun tidak terlalu prosedural. Jadi prinsipnya diperbolehkan, apabila akan dipergunakan kembali. **(Ria)-f**

DIY 'Sumuk' di Musim Hujan

YOGYA (KR) - Hujan deras masih sering mengguyur wilayah DIY dan sekitarnya. Meski demikian, masyarakat justru sering merasakan gerah atau *'sumuk'*.

Berdasarkan hasil monitoring perkembangan iklim di wilayah DIY dan sekitarnya saat ini masih dalam periode musim hujan. Setidaknya sepanjang Februari ini.

"Dan kondisi cuaca yang kita rasakan cukup gerah, disebabkan karena kondisi cuaca berawan di siang hingga malam hari. Namun tidak terjadi hujan menyebabkan panas yang diterima bumi tertahan oleh adanya awan," kata Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY Etik Setyaningrum, Selasa (20/2).

Ditambahkan, berdasarkan pengamatan gejala fisis dan dinamika atmosfer dan laut terkini menunjukkan, pola angin di atas wilayah DIY bertiup dari tenggara hingga selatan yang mengindikasikan Monsun Asia atau angin baratan tidak kuat. Ini berpotensi membentuk awan-awan kecil.

Selain itu, indeks *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO) dalam kategori *El Nino Moderat* hingga Februari 2024 mengindikasikan mengurangi curah hujan.

Indeks *'Indian Ocean Dipole'* (IOD) berada pada kondisi positif yang mengindikasikan mengurangi curah hujan. "Dari beberapa unsur dinamika atmosfer di atas memang berdampak pada pengurangan curah hujan pada masa musim hujan ini," jelasnya.

Untuk itu dalam beberapa hari hingga dua pekan depan, hujan sedang ke lebat masih berpotensi terjadi. Dan diprediksikan curah hujan pada Bulan Februari adalah 200 - 500mm/bulan kriteria sedang - tinggi. Dan diperkirakan untuk dua bulan ke depan curah hujan 200 - 500mm/bulan kriteria sedang - tinggi.

Sebelumnya dari Stasiun Meteorologi BMKG DIY juga mengeluarkan imbauan kepada warga. Waspada potensi hujan sedang - lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dapat memicu pohon tumbang/patah serta waspada hujan ringan hingga sedang namun dengan durasi panjang yang dapat memicu bencana Hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. **(Awh)-f**

RSUP Dr Sardjito Menuju Rumah Sakit Kelas Dunia

YOGYA (KR) - RSUP Dr Sardjito Yogyakarta bertekad untuk menjadi rumah sakit berkelas dunia. Skema menuju world class hospital telah disusun, seperti menyiapkan *global health professionals, innovative product, advanced health technology, new medicine, advanced treatment strategy*.

Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, dr Erniati SpKJ MMR menuturkan, saat ini rumah sakit memiliki layanan-layanan unggulan, seperti layanan kanker terpadu, health tourism, jantung terpadu, otak dan vaskuler terpadu. Adapun pengembangan layanan 2024-2045 untuk transplantasi organ meliputi transplantasi ginjal, hati dan kornea.

KR-Devid Permana

Seremonial pemotongan tumpeng HUT 42 RSUP Dr Sardjito.

"Transformasi digital terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence di bidang kesehatan," kata Erniati dalam puncak acara HUT ke-42 RSUP Dr Sardjito Yogyakarta di Ruang Bhisma Gedung Diklat lt.4 RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, Selasa (20/2) dihadiri segenap sivitas hospitalia dan para mitra. Perayaan HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X menuturkan tema HUT 42 RSUP Dr Sardjito yaitu 'Melaju Cepat untuk Masyarakat Sehat' akan mendorong inovasi dan efisiensi pelayanan kesehatan. Menurutnya, RSUP Dr Sardjito telah menjadi ujung tombak dalam pemberian layanan kesehatan berkualitas di DIY.

"Pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan telah mengubah wajah layanan kesehatan di RSUP Dr Sardjito menjadi lebih baik. RSUP Dr Sardjito tidak hanya melaju cepat, tapi juga harus semakin cerdas dan tanggap," ujarnya. **(Dev)-f**

PANGGUNG

28 TAHUN JIKUSTIK BERKARYA

Tak Hanya Berhenti di Telinga Pendengar

PADA 26 Februari 2024, Jikustik merayakan usianya yang ke-28 sejak pertama kali muncul dalam industri musik Indonesia pada tahun 1996. Saat itu, Jikustik merupakan band asli Yogyakarta yang berjuang keras untuk menyajikan karyanya bagi para penggemar musik.

Selama 28 tahun perjalanan, Jikustik tidak hanya melintasi berbagai generasi, tetapi juga menghadapi berbagai perubahan dalam industri musik. Perjalanan ini mencakup bagaimana pendengar musik menikmati karya musik, mulai dari era pita kaset hingga era TikTok yang memunculkan generasi baru penggemar musik.

"Sejujurnya, Jikustik tidak menggunakan strategi musik atau pemasaran tertentu untuk tetap relevan dengan penggemar musik. Kami hanya berkarya sesuai dengan keinginan kami," ujar Ardi Nurdin, pemain gitar Jikustik dalam siaran persnya, Selasa (20/2).

KR-Istimewa

Personel Jikustik

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-28, Jikustik akan mengadakan acara syukuran dan makan malam bersama dengan para penggemar setia mereka. Acara ini bertajuk '28 Years of Jikustik - Timeless Tunes, Endless Memories' dan akan diadakan pada 26 Februari 2024 di Hotel FortunaGrande Seturan Yogyakarta.

"Dengan menciptakan karya yang sesuai dengan apa yang kami rasakan dan inginkan, Jikustik percaya sebuah karya tidak akan berhenti di telinga pendengar, tetapi akan terus bersemayam di benak pendengar kami," imbuh Icha Aji sebagai vokalis dan pemain bass Jikustik. **(Ati)-f**

WAYANG WONG DI MUSEUM SONOBUDOYO

Gelar Lakon 'Ampak-ampak Pringgodani'

SANGGAR Tari Bimo Murti Srandakan Bantul akan pentas Wayang Wong lakon 'Ampak- ampak Pringgodani' di Museum Sonobudoyo Yogyakarta, Rabu (21/2) malam ini mulai pukul 20.00 WIB. Pentas wayang wong cerita 'Ampak-ampak Pringgodani' tersebut, naskah dan sutradara digarap oleh Eko Purnomo, didukung penata tari Bima, penata busana Jatmiko dan pimpinan produksi Suyoto.

Suyoto mengatakan, pementasan didukung anak anak, seniman-seniwati Bantul yang tergabung dalam Sanggar Tari Bimo Murti untuk daya tarik pariwisata berbasis budaya bagian Museum Sonobudoyo. dalam setiap minggu berbagai pertunjukan digelar, wayang wong, wayang topeng, wayang kulit, terbuka untuk umum.

Eko Purnomo mengungkapkan, intinya diawali oleh bujukan Sengkuni, Brajadenta mbalela untuk melakukan perlawanan kepada Pringgondani. Alasan Brajadenta mbalela karena yang berhak menjadi raja Pringgondani harus keturunan langsung dari Trembaka dan Arimba. Sedangkan Gatutkaca yang diangkat menjadi raja Pringgodani, anak dari Arimbi. Walaupun perlawanan dari Brajadenta tersebut sebenarnya ditentang oleh Brajamusti dan Kala Bendana, Brajadenta dan para kurawa dari Astina tidak menghiraukannya. Akhirnya, Brajadenta tetap mbalela didukung oleh para kurawa dari Astina. Kemudian Arimbi marah ketika mendapat laporan dari Brajamusti, akan menghentikan Brajadenta dan pasukan Astina. **(Cil)-f**

Pansus Minerba Soroti Izin Pertambangan di Daerah

Wakil Ketua Pansus Minerba DPRD Jawa Tengah Nurul Furqon saat diskusi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara. FOTO HUMAS

SEMARANG (KR) - Persoalan izin pertambangan masih menjadi pokok pembahasan Pansus IX Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Jenis Tertentu & Batuan (Minerba) DPRD Jawa Tengah. Saat Pansus menyambangi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Senin (19/2), soal perizinan menjadi bahan utama diskusi.

Wakil Ketua Pansus Minerba DPRD Jawa Tengah Nurul Furqon mengatakan, Pansus ingin mendapatkan data dan informasi dalam pengelolaan pertambangan di daerah. Pansus berharap dengan adanya masukan dari Dinas PUPR di daerah-daerah, diharapkan Raperda setelah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya penambang.

Nurul Furqon mengakui selama ini banyak penambang yang kesulitan untuk memperoleh izin penambangan. Mengingat sulitnya untuk mendapatkan izin, sehingga bermunculan para penambang liar yang dampaknya bisa merusak lingkungan di Kawasan penambangan.

"Untuk itu, Pansus IX DPRD Jawa Tengah yang saat ini sedang fokus membuat Perda MInerba, butuh masukan dari daerah agar Raperda yang sekarang sedang dibahas, kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan dan para penambang legal," tutur Nurul Furqon.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jepara Ary Bahtiar mengatakan, di Kabupaten Jepara penambangan tidak terlalu besar. Ada proses pertambangan yakni batuan andesit dan pasir di sebelah utara. Penambangan tersebut tidak terlalu bermasalah dalam hal perizinan. Meski demikian Ary mengakui masih ada penambang yang tidak berizin, tetapi jumlahnya tidak banyak. Menurut Ary, area penambangan di Jepara tidak luas karena sesuai Perda RTRW 2023-2043 Kabupaten Jepara, lahan lebih diprioritaskan untuk pertanian. Hal tersebut juga sudah disinkronkan dengan kebijakan Pusat.

Meski demikian, anggota Pansus IX DPRD Jawa Tengah Samirun tetap mempertanyakan soal perizinan tambang yang seringkali dilanggar. Menurut Samirun, selama ini pihak pengusaha/pengelola tambang menginginkan perizinan yang lebih cepat.

"Kami ingin tahu peranan Pemkab Jepara dalam mengatasi pelanggaran terkait dengan izin penambangan. Kami ingin mendengar langkah Pemkab Jepara. Siapa tahu langkah tersebut bisa menjadi masukan bagi Pansus IX untuk penyusunan Raperda," tutur Samirun.

Anggota Pansus IX Wahyudin Noor Aly juga menilai selama ini masih banyak praktik penambangan illegal. Untuk itu Pansus juga mempertanyakan langkah penegakan hukumnya di Jepara seperti apa. Pansus berharap di Kabupaten Jepara mampu menekan pertambangan ilegal tersebut secara optimal.

"Bahkan, saya mendengar, di Jepara banyak penambang ilegal yang kini sudah berizin. Kondisi itu sangat bagus sehingga kami meminta masukannya soal cara membuat mereka yang ilegal kini menjadi legal," tutur Wahyudin Noor Aly.

Menanggapi soal perizinan, Dinas PUPR Kabupaten Jepara tetap memperhatikan pertambangan sesuai dengan Perda RTRW. "Selama sudah sesuai dengan RTRW, perizinan bisa turun. Namun jika tidak sesuai, maka jangan harap izin pertambangan itu bisa keluar," tegas Ary.

Boedyo Dharmawan selaku Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jawa Tengah mengakui banyak pengusaha pertambangan yang menginginkan percepatan dalam perizinan. Perizinan harus melalui beberapa tahap agar pelaksanaannya sesuai aturan berlaku. **(Adv/Anf/Bdi)**